

## ABSTRAK

Peranan pemerintah dalam bidang perekonomian merupakan suatu hal yang menentukan. Campurtangan pemerintah dalam bidang itu dapat mengurangi kecenderungan *free fight liberalism*. Kecenderungan itu merupakan akibat langsung dari mekanisme pasar yang bertumpu pada hukum permintaan dan penawaran.

Dengan ikut mengambil bagian dalam pengaturan perekonomian, pemerintah dapat melindungi kepentingan rakyat. Hal itu dapat dilakukan misalnya dengan penetapan Undang-Undang (UU) Anti Monopoli, UU Perusahaan Kecil dan Menengah. Nasionalisasi merupakan tindakan pemerintah atau negara untuk mengambil alih perusahaan milik swasta, baik asing maupun nasional demi kepentingan negara dan rakyat. Pengambilalihan itu dan ganti kerugian yang wajar ditetapkan dengan UU.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pernah dijalankan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1957. Mengapa tindakan itu dijalankan? Siapa pemrakarsa utama tindakan itu? Dan Bagaimana akibatnya?

### Nasionalisasi dan Masalah Irian Barat

Gagasan untuk melakukan tindakan nasionalisasi secara kuat dicetuskan, ketika perundingan-perundingan masalah Irian Barat mengalami kemacetan. Pengambilalihan perusahaan dan modal milik Belanda itu dijalankan sebagai senjata ekonomi untuk memaksa Belanda berunding kembali.

Pada awal tahun 1950-an sudah disadari perlunya melakukan "Indonesianisasi" perekonomian nasional. Ada dua pandangan yang saling bertentangan untuk melakukannya. Pertama, kelompok Soekarno : Indonesianisasi dilakukan

## PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

xi

dengan radikal, merombak struktur perekonomian yang masih dikuasai Belanda yang mendapat legitimasi dari KMB. Kedua, kelompok Hatta menghendaki agar dilakukan secara evolutif. Bagi Hatta kehadiran modal dan dunia usaha asing tidak menjadi masalah, kalau pemerintah mampu menjaga agar kehadirannya tidak merugikan rakyat. Indonesianisasi perekonomian harus dilakukan tahap demi tahap, sampai pada akhirnya pengusaha nasional mampu mengambil alih.

Kelompok Hatta yang terkesan kurang patriotik dan populer, dapat "dikalahkan" oleh kelompok Soekarno. Maka Indonesianisasi perekonomian dengan nasionalisasi terjadi.

Soekarno pada awal bulan Desember 1957 sudah memerintahkan kepada bekas-bekas tentara pelajar untuk menguasai perusahaan Belanda. Dengan bekerjasama dengan para buruh, mereka mengadakan aksi penguasaan Perusahaan Pelayaran Belanda (KPM) di Jalan Merdeka Timur, disusul oleh semua perusahaan dan perkebunan Belanda. Langkah itu segera diikuti oleh organisasi-organisasi buruh PKI dan PNI. Di samping itu TNI-AD, dengan alasan keamanan, menguasai untuk sementara perusahaan bekas milik Belanda itu. Langkah AD itu disetujui oleh Soekarno dan Djuanda.

Akibat yang sudah diperkirakan oleh kelompok Hatta, terjadi. Ketidak mampuan managerial dan teknis perusahaan menjadikan menurunnya produksi. Belanda mengalami penurunan pendapatan yang diperoleh dari Indonesia dari sebesar 10 persen dari pendapatan nasionalnya menjadi 1,5 - 2 persen. pada akhir tahun 50-an. Tetapi penurunan itu tidak melumpuhkannya karena mendapat suntikan dana dari AS dalam rangka program Marshall. "Senjata ekonomi" itu tidak berhasil memaksa Belanda berunding membicarakan masalah penyerahan Irian Barat. Tetapi keadaan perekonomian yang memburuk menjadikan rasa permusuhan dengan Belanda memuncak. Dan penyelesaian dengan kekuatan senjata pun terjadi.